



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TINJAUAN YURIDIS PUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN PULSA DAN TOKEN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 6/PMK.03/2021 TENTANG PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA PAJAK PENGHASILAN ATAS PENYERAHAN / PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PENJUALAN PULSA, KARTU PERDANA, TOKEN DAN VOUCHER DI KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Mendapat Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

NARDI

NIM. 11727100352

PROGRAM S 1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021 M/1443 H



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pungutan Pajak Penghasilan atas penjualan pulsa dan token berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 6/PMK.03/2021 Tentang Penghitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai serta pajak penghasilan atas penyerahan / penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token dan voucher di kecamatan Koto Kampar Hulu”** yang ditulis oleh:

Nama : NARDI
NIM : 11727100352
Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 / 7 / 2021 M 1442 H

Pembimbing Skripsi

H.MHD.KASTULANI, SH.,MH
NIP. 196309091990021001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS PUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN PULSA DAN TOKEN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 6/PMK.03/2021 TENTANG PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA PAJAK PENGHASILAN ATAS PENYERAHAN / PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PENJUALAN PULSA, KARTU PERDANA, TOKEN DAN VOUCHER DI KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU"** yang ditulis oleh :

Nama : **NARDI**
 NIM : **11727100352**
 Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : **Jumat, 6 Agustus 2021**
 Waktu : **13.00 WIB**
 Tempat : **Daring / Online**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Agustus 2021
TIM PENGUJI MUNAQSAH

Ketua
Asrit, SH., M.H

Sekretaris
Dr. M. Alfi Syahrin, SH., M.H

Penguji I
Peri Pirmansyah, SH., M.H

Penguji II
Lysa Angraini, SH., M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M. Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nardi, (2021): Tinjauan Yuridis Pungutan Pajak Penghasilan atas-penjualan pulsa dan token berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 6/PMK.03/2021 Tentang Penghitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai serta pajak penghasilan atas penyerahan / penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token dan voucher di kecamatan Koto Kampar Hulu

Dengan adanya peraturan ini saya selaku peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi peraturan ini karena ini sangat menarik dan juga sangat berdampak besar pada sistem Pungutan Pajak Penghasilan

Di Indonesia Khususnya Pungutan pajak penghasilan atas penjualan pulsa dan token menggunakan sistem *Withholding tax system* yaitu pihak ketiga diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan sekaligus menyetorkannya ke kas negara

Dalam penelitian ini mempertanyakan Tinjauan pengaturan, pelaksanaan, dan kendala yang di hadapi pengecer terhadap pemungutan pajak penghasilan atas penjualan pulsa dan token

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (*yuridis sosiologis*), yaitu dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggambarkan dan menjelaskan sesuai dengan fakta penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi faktual secara rinci, mengidentifikasikan masalah atau memeriksa kondisi dan gejala lainnya di dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui : 1. Peraturan Menteri keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 Tentang Penghitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai serta pajak penghasilan atas penyerahan / penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token dan voucher Adanya Kelemahan Kelemahan dalam Peraturan Perpajakan ini yang dapat mudahnya diselewengkan oleh server pulsa. 2. Penyelewengan yang dilakukan merugikan Pedagang Pulsa yang tidak termasuk sebagai wajib pajak. 3. Tidak adanya pelaporan SPT yang dilakukan oleh server pulsa kepada pedagang yang menjadi wajib pajak

Kata kunci: Pulsa dan token, Server pulsa, pedagang, Pajak Penghasilan, *Withholding tax system*, Penyelewengan



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Anas (Alm) yang Selalu Bersikeras Kepada Penulis agar Penulis terus melanjutkan pendidikan dan Ibunda Rahma yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih bapak & ibu atas doa, restu dan ridho nya.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag Rektor UIN Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Firdaus SH. MH dan Sekretaris Jurusan Bapak Muslim S.Ag, SH., M.Hum serta staf jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ayahanda H. Mhd Kastulani SH, MH sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Maghfirah M.Ag selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
8. Kepada Teman-teman kelas Ilmu Hukum angkatan 2017, terkhusus kepada kelas Progrethion dan juga Hukum Bisnis A.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 2021

NARDI
NIM.11727100352



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Metode Penelitian	7
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	13
A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar	13
B. Sejarah Kecamatan Koto Kampar Hulu	14
C. Desa Tanjung	16
D. Desa Sibiruang.....	22
BAB III TINJAUAN TEORITIS.....	30
A. Teori Tinjauan Yuridis	30

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengertian Tinjauan	30
2. Pengertian Yuridis.....	30
B. Teori Pajak.....	31
1. Pengertian Pajak.....	31
2. Bentuk bentuk Pajak	32
3. Pajak Penghasilan.....	36
C. Teori Perundang-undangan.....	43
1. Pengertian Perundang – undangan	43
2. Hierarki Perundang- Undangan.....	44
3. Regeling dan Beschikking.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Tinjauan Yuridis Pungutan Pajak Penghasilan Atas Penjualan Pulsa dan Token Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 di Kecamatan Koto Kampar Hulu.....	58
B. Kendala yang di hadapi pedagang Pulsa dan Token setelah berlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 dan Upaya yang di lakukan.....	66
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Populasi dan Sampel.....	9
Tabel II.1 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Tanjung ...	18
Tabel II.2 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan suku di Desa Tanjung.....	18
Tabel II.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan	19
Tabel II.4 Klasifikasi Agama di Desa Tanjung.....	20
Tabel II.5 Jumlah Penduduk Desa Tanjung Berdasarkan Mata Pencaharian	21
Tabel II.6 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Sibiruang .	23
Tabel II.7 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Mata Pencarian di Desa sibiruang	24
Tabel II.8 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan tingkat Pendidikan di Desa Sibiruang.....	25
Tabel II.9 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Sibiruang	27
Tabel IV.1 Server pulsa yang digunakan pedagang.....	61
Tabel IV.2 Rata-Rata Deposit pedagang pulsa di Kecamatan Koto Kampar Hulu.....	65
Tabel IV.3 Kenaikan harga modal sejak 1 Februari 2021	67
Tabel IV.4 Perbandingan jumlah transaksi sebelum dan sesudah berlakunya peraturan pajak penghasilan atas penjualan pulsa dan token.....	69



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan suatu negara memerlukan dana yang tidak sedikit, kebutuhan untuk pembangunan sifatnya proporsional dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan yang sedang dan akan berlangsung. Kebutuhan akan dana pembangunan dapat diperoleh melalui berbagai cara yang kesemuanya diharapkan dapat memperkuat sektor keuangan negara dalam hal ini adalah sektor pajak

Berdasarkan Undang-undang nomor 16 tahun 2009¹ tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat

Sebelum amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ketentuan mengenai pajak diatur dalam Pasal 23 ayat (2) “Segala pajak untuk keperluan negara harus berdsarkan undang-undang”. Setelah amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ketentuan mengenai pajak mengalami perubahan yang sangat prinsipil yang diatur dalam Pasal 23A “Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk

¹ Undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keperluan negara diatur dengan undang-undang”². Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

Pajak harus dilaksanakan dan ditaati, Undang-Undang Pajak tidak boleh tidak harus berintikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dengan demikian, terjelmalah pertautan antara kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat dalam konstelasi undang-undang pajak³. Penting dan strategisnya peran serta sektor perpajakan dalam penyelenggaraan pemerintah dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), setidaknya pada tahun 2020 penerimaan sektor pajak mencapai RP 1.019,56 Triliun atau 85,65% dari volume penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sisanya sebesar 14,35% Bersumber dari Pendapatan lainnya⁴ pendapatan pajak tahun 2020 lebih kecil dibandingkan pendapatan pajak pada tahun 2019 kontribusi penerimaan pajak pada APBN lebih dari 85,65%⁵.

Menurut Judisseno,⁶ pajak merupakan salah satu bentuk iuran masyarakat.

Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, peran pajak sangat besar dan

² Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak- Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) h.13.

³ Muhammad Djafar Saidi. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2007) h. 2.

⁴ [Kemenkeu.go.id/APBN/2020](http://kemenkeu.go.id/APBN/2020)

⁵ <http://anggaran.depkeu.go.id>

⁶ Rimsky K. Judisseno, 2004, *Perpajakan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan.

Dengan perkembangan Pembangunan yg terus meningkat kebutuhan listrik juga terus bertambah, berdasarkan data kementerian ESDM, capaian konsumsi listrik pada tahun 2020 sebesar 1.142 kWh per kapita di bagi menjadi 2 jenis Penggunaan Listrik diantaranya 13,1 juta pelanggan menggunakan listrik pra bayar (Token)⁷, listrik pra bayar atau yang sering disebut listrik pintar adalah sistem pembayaran listrik yang dilakukan di awal, dimana pelanggan dapat mengendalikan berapa banyak energy listrik yang diinginkan,

Meningkatnya kebutuhan listrik Juga tidak terlepas dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, indonesia pada saat ini menduduki peringkat ke 4 pengguna smartphone aktif di dunia, dengan pengguna lebih dari 100 juta orang⁸ dengan begini penggunaan pulsa di Indonesia sangatlah tinggi, berdasarkan pelaporan data dari survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada senin 09 november 2020 menyatakan bahwa pada tahun 2020 Penetrasi internet Indonesia berjumlah 73,7% atau sebesar 196,7 juta pengguna dengan jumlah yang begitu banyak Pemajakan atas Pulsa dan Token Listrik diharapkan dapat semakin meningkatkan perkembangan Pembangunan Negara Republik Indonesia

⁷ [Http://m.liputan6.com/bisnis/read/808478/131-juta-pelanggan-listrik-pra-bayar-ri-terbesar-di-dunia](http://m.liputan6.com/bisnis/read/808478/131-juta-pelanggan-listrik-pra-bayar-ri-terbesar-di-dunia)

⁸ Kominfo.go.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada 22 Januari 2021 lalu, industri perpulsaan dikenakan pajak yang dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucher. Ketentuan ini merupakan kebijakan meneteri keuangan yang mengatur tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu

Dimana pungutan Pph kepada pengecer dilakukan oleh distributor tingkat kedua (server pulsa) sebesar 0,5% pemungutan dilakukan dengan beberapa cara⁹:

1. Dengan menagih nilai yang dikenakan oleh distributor tingkat kedua
2. Menaikkan harga jual atas penjualan kepada pelanggan secara langsung

$$\text{Bruto PPH Terutang} = 0,5\% \times \text{Jumlah deposit}$$

Dalam peraturan menteri keuangan Nomor 6/PMK-03/2021 pasal 18 ayat 6 dijelaskan pungutan pph tidak dilakukan atas pembayaran oleh penyelenggara distributor tingkat selanjutnya / pengecer yang jumlah deposit paling banyak 2.000.000 rupiah, tidak termasuk ppn dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu nilai transaksi yang sebenarnya lebih dari 2.000.000 dalam lampiran peraturan menteri ini yang tidak dapat dipisahkan dengan peraturan ini dijelaskan jika melakukan deposit di atas 2.000.000 akan dikenakan pajak sebesar 0,5% tetapi tidak dikenakan pungutan pajak apabila deposit dibawah 2.000.000 walaupun melakukan deposit dalam bulan yang

⁹ Peraturan menteri keuangan Nomor 6/PMK-03/2021 Tentang Penghitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai serta pajak penghasilan atas penyerahan / penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token dan voucher

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

sama Seorang pelaku usaha dikatakan wajib pajak hanya yang deposit minimal Rp. 2.000.000, namun di dalam cara pemungutan pajak yang kedua peneliti temukan banyak penyelewengan karena itu peneliti beranggapan begitu pentingnya masalah ini untuk di teliti Oleh karena itu peneliti tertarik untuk memilih judul :

“TINJAUAN YURIDIS PUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN PULSA DAN TOKEN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 6/PMK.03/2021 TENTANG PRNGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA PAJAK PENGHASILAN ATAS PENYERAHAN / PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PENJUALAN PULSA, KARTU PERDANA, TOKEN DAN VOUCHER DI KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU”

B. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan Maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian tentang Tinjauan Yuridis Pungutan Pajak Penghasilan Atas Penjualan Pulsa dan Token Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 6/PMK.03/2021 terhadap pemilik kios pulsa di wilayah Kecamatan Koto Kampar Hulu

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka peneliti dalam penelitian ini ingin membuat suatu perumusan masalah yaitu :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Pungutan Pajak Penghasilan Atas Penjualan Pulsa dan Token Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 di Kecamatan Koto Kampar Hulu ?
2. Apa saja Kendala yang di hadapi pengecer pulsa dan token setelah di berlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 dan bagaimana upaya yang di lakukan oleh pengecer ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Pungutan Pajak Penghasilan Atas Penjualan Pulsa dan Token Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 di Kecamatan Koto Kampar Hulu
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang di hadapi pengecer pulsa dan token setelah di berlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 dan bagaimana upaya yang di lakukan oleh pengecer.

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Strata satu Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang tinjauan yuridis Pungutan Pajak Penghasilan Atas Penjualan Pulsa dan Token Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 Tentang Penghitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak penghasilan atas penyerahan / penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token dan voucher di Kecamatan Koto Kampar Hulu serta memberikan informasi apa kendala yang di hadapi Pengecer setelah di berlakukannya peraturan menteri keuangan nomor 6/PMK/2021

3. Bagi pembaca semoga dapat menjadi tambahan referensi perpustakaan dalam mencari perbandingan khusus bagi mahasiswa dan masyarakat umum lainnya.
4. Sebagai bahan kajian, rujukan menambah ilmu pengetahuan serta sebagai bahan informasi bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan terhadap ruang lingkup yang sama.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menyelidik, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa yang ada di masyarakat.¹⁰ Dalam kejadian atau peristiwa tersebut menurut peneliti tidak dapat di jelaskan dalam bentuk angka-angka melalui metode penelitian kuantitatif. Metode kualitatif ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (*yuridis sosiologis*), yaitu dengan cara melakukan survey

¹⁰ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Prenadamedia Group. 2016) h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggambarkan dan menjelaskan sesuai dengan fakta penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi faktual secara rinci, mengidentifikasikan masalah atau memeriksa kondisi dan gejala lainnya di dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti melakukan penelitian ini di Wilayah Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Pedagang Pulsa dan Token di wilayah kecamatan Koto Kampar Hulu

b. Objek Penelitian

Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Pungutan Pajak Penghasilan atas penjualan Pulsa dan Token Oleh Pihak ketiga

4. Populasi dan Sampel

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian, Sampel sejumlah anggota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dipilih dari populasi.¹¹ Teknik dalam pengambilan sampel adalah *Quota Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sebanyak populasi yang telah ditentukan oleh peneliti¹².

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Pemilik kios pulsa di Kecamatan Koto Kampar Hulu	8 orang	8 orang	100%
2	Sales Server Pulsa Digipos Aja wilayah Kecamatan Koto Kampar Hulu	1 orang	1 orang	100%
3	Mitra Agen Pulsa Propana Reload wilayah Kecamatan Koto Kampar Hulu	1 orang	1 orang	100%
Jumlah		10 orang	10 orang	100%

5. Sumber Data

- a. Data Primer umumnya berupa; karakteristik demografi atau sosioekonomi, sikap atau pendapat, keasadaran atau pengetahuan, minat atau Motivasi perilaku (Tindakan atau Penggunaan).¹³ Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui pengumpulan data yang berkaitan dengan penjualan Pulsa, kartu perdana token listrik dan voucher .
- b. Data Sekunder Jika telah disusun, dikembangkan, dan diolah kemudian tercatat disebut disebut Data sekunder.¹⁴ Data ini diperoleh dari Perpustakaan atau dari Laporan-laporan Peneliti terdahulu, Tesis,

¹¹ *Ibid. h. 147*

¹² *Ibid. h. 151*

¹³ *Ibid. h. 137*

¹⁴ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang, Peraturan Menteri. Data sekunder disebut juga data tersedia. Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu untuk dapat digunakan oleh peneliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data benar dan relevan diperlukan, maka perlu menggunakan metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah :

- a. Observasi yaitu proses melihat, mengamati dan mencermati dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap objek maupun subjek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Wawancara (Interview), merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai/responden tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.¹⁵
- c. Kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

7. Teknik Analisis Data

¹⁵ Ibid. h. 138

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian.¹⁶. Analisis data ini dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dengan cara mentafsirkan atau menjelaskan gejala yang terjadi. Setelah terkumpul, kemudian dilakukan pengelolaan data yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Proses awal pengolahan data itu dimulai dengan melakukan editing setiap data yang masuk. Apabila data yang diperoleh dari lapangan hanya sedikit dan bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun secara Klasifikatoris), maka analisis yang digunakan analisis kualitatif. Metode ini juga bermanfaat untuk mensinyalir data yang kurang objektif dari data yang dikemukakan oleh responden melalui wawancara, dengan demikian data yang diperoleh benar-benar merupakan data yang dapat dipertanggung jawabkan.

8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah cara atau sistem untuk menyelesaikan penelitian, maka penulis harus menyusun beberapa sistematika penulisan, seperti pendahuluan, tujuan dan metode.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

¹⁶ *Ibid. h. 163*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada Bab ini Tinjauan Umum Lokasi Penelitian yaitu Kecamatan Koto Kampar Hulu

BAB III : TINJAUAN TEORI

Pada bab ini Tinjauan Teori berkenaan dengan Tinjauan Yuridis Pungutan Pajak Penghasilan Atas Penjualan Pulsa dan Token Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 Tentang Penghitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai serta pajak penghasilan atas penyerahan / penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token dan voucher terhadap Pemilik kios di wilayah Kecamatan Koto Kampar Hulu

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini yaitu ;

- A. Bagaimana Tinjauan Yuridis Pungutan Pajak Penghasilan Atas Penjualan Pulsa dan Token Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 Tentang Penghitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai serta pajak penghasilan atas penyerahan / penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token dan voucher terhadap Pemilik kios di wilayah Kecamatan Koto Kampar Hulu
- B. Apa saja kendala yang di hadapi pengecer pulsa dan token setelah di berlakukannya Peraturan Menteri Keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 6/PMK.03/2021 dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pengecer

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir (penutup) dari pembahasan karya ilmiah (skripsi) yang berisi kesimpulan, saran-saran dari penulis.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 tahun 1956, kemudian dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 , maka Kabupaten Kampar resmi di mekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar sebagai Kabupaten Induk. Kabupaten Kampar terletak pada 010 .00’ 40“ Lintang Utara, 000 27’ 00 Lintang selatan dan 1000 28’30” – 1010 14’ 30 “ Bujur Timur dengan Luas wilayah 11.289,28 Km2 atau + 11,62 % dari luas wilayah Propinsi Riau (94.561,60 Km2) beriklim tropis dengan curah hujan antara 200 – 300 mm/tahun. Ibu kota Kabupaten Kampar berpusat di Bangkinang yang berjarak kurang lebih 60 Km dari Kota Pekanbaru, dan terbagi dalam 21 Kecamatan, yaitu terdiri dari 242 Desa dan 8 Kelurahan.

Adapun 21 Kecamatan tersebut yaitu : Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kecamatan Tambang, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kecamatan Bangkinang Barat, Kecamatan Salo, Kecamatan Perhentian Raja, Kecamatan Kampar, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kecamatan Kampar Timur, Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Rumbio Jaya, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kecamatan Koto Kampar Hulu Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar adalah 679,285 jiwa dengan pertumbuhan penduduk tahun 2009 yaitu 3,27 % (Kampar dalam angka tahun 2009).

Kabupaten Kampar mempunyai batas wilayah : Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Propinsi Sumatera barat, Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.

Kabupaten Kampar dilintasi oleh dua sungai besar yaitu sungai Kampar yang panjangnya kurang lebih 413,5 Km, dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar 143 m. Pada bagian hulu sungai ini bercabang dua yaitu sungai kampar kanan dan sungai kampar kiri, pada bagian hulu sungai kampar kanan terdapat PLTA koto panjang dengan luas genangan 12.000 Ha. Berfungsi sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang mampu mensuplay kebutuhan energi listrik sebesar 114 Kwt.

Selain Sungai Kampar, Kabupaten juga terdapat sungai Tapung Kiri yang panjangnya kurang lebih 90 Km dan sedalam 8 – 12 m, selain berfungsi sebagai sumber energi, sungai di Kabupaten kampar juga dimanfaatkan sebagai lahan penghidupan masyarakat.¹⁷

B. Sejarah Kecamatan Koto Kampar Hulu

Kecamatan Koto Kampar Hulu merupakan salah satu dari 9 (sembilan) Kecamatan baru hasil dari pemekaran di Kabupaten Kampar.

¹⁷ Profil Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kecamatan Koto Kampar Hulu merupakan pemekaran dari Kecamatan XIII Koto Kampar yang dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 22 tahun 2003 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 2 tahun 2010. Kecamatan Koto Kampar Hulu diresmikan oleh Bupati Kampar pada tanggal 11 Juni tahun 2010 yang ibu Kecamatannya Desa Tanjung dengan camat pertama bernama Mahrusi, SST. Sebagai Kecamatan yang baru dibentuk, kondisi yang ada di Kecamatan Koto Kampar Hulu serba terbatas, untuk itu aparatur pemerintahan Kecamatan koto kampar Hulu berupaya melakukan pengembangan dari sektor sarana dan prasaran di Kecamatan, kemudian Kecamatan Koto Kampar Hulu juga bertekad agar Visi Bapak Bupati Kampar yaitu mewujudkan Kabupaten Kampar sebagai pusat agribisnis dalam lingkungan masyarakat yang berbudaya, sejahtera dan Agamis pada tahun 2011 dapat tercapai dan terwujud, terutama di Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Desa yang ada di Kecamatan Koto Kampar Hulu berjumlah 6 desa dengan nama-nama desa yaitu sebagai berikut¹⁸:

1. Desa Tanjung.
2. Desa Tabing.
3. Desa Pongkai.
4. Desa Gunung Malelo
5. Desa Sibiruang
6. Desa Bandur Picak

¹⁸ Dokumen Kantor Kecamatan Koto Kampar Hulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Desa Tanjung

1. Keadaan Geografis

Desa Tanjung termasuk desa yang tertua di Kecamatan XIII Koto Kampar dan Desa Tanjung sudah ada sebelum keberadaan kerajaan muara takus, sejarah juga mengatakan pembangunan candi muara takus juga melibatkan masyarakat Desa Tanjung, dapat disimpulkan berdirinya Desa Tanjung sebelum abad ke 7 (tujuh) sebelum tahun 600 M. Sekarang Kecamatan XIII Koto Kampar dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan yaitu dengan nama Kecamatan Koto Kampar Hulu, yang diresmikan oleh Bupati Kampar Drs. BURHANIDDIN HUSIN, MM pada hari jumat 11 juni 2010 dengan Ibu Kota Kecamatan Koto Kampar Hulu yaitu Desa TANJUNG. Desa tanjung berjarak 2 Km dari Ibu Kota Kecamatan Koto Kampar Hulu, dan jarak dengan ibu kota kabupaten 60 Km, sedangkan jarak dengan Ibu Kota Provinsi 120 Km. Desa Tanjung pada awalnya bernama Ujung Tanjung yang diberi nama oleh Datuk Godang cincin. Menurut sejarah dialah pendiri Desa Tanjung (sebelum abad ke 7) karena :

- a. Desa Tanjung dikelilingi oleh Sungai Kampar(daratan yang menonjol kesungai)
- b. Adanya sebatang bunga tanjung yang terletak ditengah-tengah Desa
- c. Tanjung yang diperkirakan sudah ada semenjak adanya Desa Tanjung.

Dan karena adanya evolusi oleh masyarakat sering disebut dengan nama tanjung sehingga nama tersebut melekat hingga sekarang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Luas wilayah Desa Tanjung 30 Km x 25 Km, sedangkan yang dijadikan areal pemukiman 3 Km. Adapun suhu udara berkisar 21 C” sampai 34 C” dengan curah hujan 2000 mm sampai 3000 mm pertahun.

Topografi Desa Tanjung datar dan bergelombang hingga berbukit dan produktifitas tanah yang termasuk tinggi sehingga bisa tumbuh dengan subur.

Ditinjau dari batas wilayahnya desa tanjung berbatasan dengan :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pongkai dan Desa Tabing
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Muara Takus dan Kabupaten 50 kota (Simatera Barat)
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Gunung Bungsu dan Desa Muara Takus
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tabing dan ngarai Muara Paiti Kabupaten 50 Kota (Sumatera Barat).

Dalam struktur sehari-hari mengenai kewilayahan, disamping wilayah administrative Desa, Desa Tanjung juga dikenal dengan hukum adat, yang mempunyai wilayah yang dikenal dengan tanah ulayat yang dikuasai oleh ninik mamak untuk kepentingan cucu kemenakan

2. Keadaan Demografis

Demografis (kedudukan penduduk) Desa Tanjung dengan jumlah penduduk 5.713 jiwa dan jumlah kepala keluarga (kk) 1478 kk. Dengan klasifikasi sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Klasifikasi menurut jenis kelamin

Tabel II.1

Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Tanjung

No	MENURUT JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki laki	2.731
2	Perempuan	2.560
Jumlah		5.291

Sumber : Kantor Desa Tanjung

Berdasarkan klasifikasi penduduk Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar menurut Jenis Kelamin, laki laki 2930 jiwa dan perempuan 2772 jiwa. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk yang berjenis kelamin laki laki lebih banyak yaitu 2930 jiwa.

b. Menurut Suku

Tabel II.2

Klasifikasi Penduduk Berdasarkan suku di Desa Tanjung

No	MENURUT SUKU	JUMLAH
1	Melayu	5.108
2	Minang	98
3	Batak	29
4	Jawa	40
5	Lainnya	16
Jumlah		5.291

Berdasarkan klasifikasi penduduk Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar menurut suku, suku melayu/penduduk asli 5617 jiwa,suku Minang 58 jiwa, Suku Batak 20 jiwa, Suku Jawa 18 jiwa. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk yang bersuku melayu/penduduk asli yang paling banyak yaitu 5617 jiwa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pendidikan dan agama

1) Pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang ada di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Tamatan SD	2.426
2	Tamatan SMP/ sederajat	662
3	Tamatan SMA/ sederajat	460
4	Tamatan Perguruan Tinggi	145
5	Tidak Bersekolah / tidak tamat SD	158
6	Belum Bersekolah	1.440
Jumlah		5.291

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan tingkat pendidikan penduduk yang terbanyak adalah penduduk yang duduk dibangku sekolah dasar sebanyak 2717 jiwa,. Ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di desa tanjung masih tergolong rendah atau masih tahap perkembangan

d. Agama

Dalam masalah agama di daerah ini, terutama penduduk asli 100% beragama Islam, hal ini dikarenakan penduduk yang tinggal di Desa Tanjung ini sebahagian besar adalah penduduk pribumi. Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu termasuk penganut agama yang kuat, hal ini dapat dilihat bahwa hampir disetiap dusun mempunyai musholla atau surau yang dijadikan sebagai tempat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibadah dan upacara-upacara Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), dan juga dijadikan sebagai tempat pertemuan dan musyawarah dalam membicarakan permasalahan yang ada dimasyarakat dalam rangka untuk memperbaiki kampung, jumlah agama di desa tanjung dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.4
Klasifikasi Agama di Desa Tanjung

No	AGAMA	JUMLAH
1	Islam	5.291
2	Agama Lain	-
Jumlah		5.291

Pembangunan sarana tempat ibadah pada umumnya merupakan hasil swadaya masyarakat, dan hanya sebagian kecil yang mendapat bantuan dari lembaga pemerintah seperti Departemen Agama dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar maupun Pemerintah Propinsi

e. Sosial Budaya dan Ekonomi

1. Sosial budaya

Masyarakat Desa Tanjung sebagaimana masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu pada umumnya. Adalah masyarakat yang menisbahkan keturunanya kepada ibu artinya budaya yang berlaku dalam masyarakat adalah budaya minang kabau, seperti yang terlihat dalam system kekeluargaan dan kekerabatan. Dalam pergaulan hidup sehari hari, tradisi yang dipraktekan sesuai dengan tata nilai dan norma yang berlaku. Dalam membentuk rumah tangga orang harus mengikuti aturan agama dan adat, yang satu sama lainya saling melengkapi adat bersendi syarak, syarak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersendi kitabullah. Dari segi prinsip material peranan Islam sangat dominan, karena hampir semua sisi- sisi pandangan serta sikap hidup diwarnai dengan nilai ke Islaman, dengan tidak mengabaikan nilai-nilai adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut. Dewasa ini, terutama di era kemajuan sains dan teknologi, ketika masyarakat telah ikut memanfaatkan produk teknologi modern seperti teknologi komunikasi dan transportasi, membawa perubahan pula kepada pandangan hidup sebahagian masyarakat di daerah ini. Dapat disaksikan pola hidup yang konsumtif telah mulai menjejala di dalam kehidupan masyarakat di Desa Tanjung

f. Mata Pencaharian Penduduk

Untuk mengetahui kebutuhan hidup bagi diri dan keluarga, seseorang memerlukan lapangan usaha sebagai mata pencaharian. Besa kecilnya penghasilan yang diperoleh tidak jarang dipengaruhi oleh lapangan usaha. Berikut ini dapat dilihat jumlah penduduk desa tanjung berdasarkan jenis mata pencaharian.

Tabel II.5
Jumlah Penduduk Desa Tanjung Berdasarkan Jenis Mata Pencaharian

No	JENIS MATA PENCAHARIAN	Jumlah
1	Petani	2.745
2	Pedagang	366
3	Buruh / Jasa	260
4	Pegawai Negeri Sipil	110
5	Pegawai Swasta	77
6	TNI / POLRI	28
7	Belum Bekerja	1.619
8	Lainnya	86
Jumlah		5.291

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu adalah Petani berjumlah 2920 jiwa, Pedagang berjumlah 499 jiwa, PNS berjumlah 110 jiwa, Swasta berjumlah 77 jiwa, TNI/POLRI berjumlah 28 jiwa, Buruh / Jasa berjumlah 360 jiwa, sedangkan yang belum bekerja berjumlah 1719 jiwa. Maka dapat di ketahui bahwa jumlah mayoritas penduduk Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu adalah sebagai Petani.

D. Desa Sibiruang

1. Keadaan Geografis

Desa Sibiruang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau. Desa Sibiruang letaknya lumayan jauh dari pusat kecamatan Koto Kampar Hulu dan Juga Jauh dari Ibukota Kabupaten Kampar. Jarak Desa Sibiruang ke Ibu Kota Kecamatan Koto Kampar Hulu adalah 15 KM sekitar 20 menit perjalanan, dan jarak dari Ibukota Kabupaten Kampar adalah 85 KM sekitar 2 jam perjalanan, serta jarak Desa Sibiruang dengan Ibukota Propinsi Riau adalah 130 KM sekitar 3 jam perjalan. Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar mempunyai batas-batas wilayah, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Kecamatan Tandun
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Gunung malelo
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Bandur Picak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Sebelah Timur berbatasan dengan : Kec. Kapur IX Provinsi Sumatera Barat.

Luas wilayah desa Sibiruang adalah 24.000 M2 dimana 40% berupa daratan yang bertopografi berbukitbukit, dan 60 % daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan tadah hujan dan Perkebunan Karet dan Kelapa Sawit

2. Keadaan Demografis

Iklim desa Sibiruang, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di desa Sibiruang Kecamatan Koto kampar Hulu. Berdasarkan data statistik pada tanggal 29 November 2020, Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu memiliki jumlah penduduk sebanyak 2628 jiwa. Dengan perincian 1344 orang laki-laki dan 1284 orang perempuan yang terhimpun dalam 677 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan tabel sebagai berikut:

Tabel II.6
Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Sibiruang

No	Menurut Jenis Kelamin	Jumlah / Jiwa
1	Laki laki	1.344
2	Perempuan	1.284
Jumlah		2.628

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah penduduk desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar hampir berimbang antara yang jenis laki-laki (1344 jiwa) dengan presentase (51,14%) dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan (1284 jiwa) dengan presentase (48,86%). Berdasarkan presentase di atas jelaslah perbandingan antara laki-laki dan perempuan.

Ekonomi dan Mata Pencarian Sumber mata pencarian adalah suatu hal yang sangat urgen (penting) bagi setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik dengan cara menggunakan tenaga maupun dengan menggunakan skill. Dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat desa Sibiruang memiliki beragam bentuk pekerjaan, ada yang bergerak dibidang perkebunan, pertanian, pedagang, buruh, pegawai negeri sipil (PNS), nelayan, pertukangan, karyawan swasta dan pekerjaan lain yang digeluti masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel II.7
Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Mata Pencarian di Desa sibiruang

No	JENIS MATA PENCAHARIAN	Jumlah
1	Petani	927
2	Pedagang	189
3	Buruh / Jasa	278
4	Pegawai Negeri Sipil	28
5	Nelayan	29
6	Pengusaha Kecil	154
7	Belum Bekerja	1.023
Jumlah		2628

Dari tabel di atas jelas bahwa masyarakat desa Sibiruang, memiliki mata pencarian di sektor pertanian sebanyak 927 orang, dengan presentase sebanyak 35%, 189 orang bekerja dibidang perdagangan dengan presentase sebanyak 7%, 278 orang bekerja dibidang buruh harian lepas dengan presentase sebanyak 11%, 28 orang sebagai pegawai negeri sipil dengan presentase 1%, 99 orang bekerja disektor perikanan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

presentase sebanyak 4%, 154 orang masyarakat desa Sibiruang bekerja sebagai pengusaha kecil menengah, dengan presentase sebanyak 6%, 17 orang sebagai montir mata pencahariannya dengan presentase sebanyak 1%, 217 orang pekerjaannya tidak menetap dengan presentase sebanyak 8%, serta 719 orang penduduk desa Sibiruang belum bekerja dengan presentase sebanyak 27%. Jadi di desa Sibiruang dalam bidang pekerjaan masyarakat bersifat heterogen atau beragam, namun yang paling banyak adalah disektor pertanian, karena desa Sibiruang memiliki lingkungan yang cukup baik dan mendukung.

Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu yang turut mempengaruhi masyarakat dalam memberikan respon ataupun persepsi-persepsi terhadap apa yang dialaminya. Kesadaran masyarakat desa Sibiruang Kecamatan akan pendidikan terlihat dari banyak yang berlomba-lomba untuk menuntut ilmu diberbagai sekolah maupun perguruan tinggi d Propinsi, luar Propinsi bahkan ada yang keluar negeri. Untuk melihat keadaan pendidikan masyarakat desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, perhatikan tabel berikut :

Tabel II.8
Klasifikasi Penduduk Berdasarkan tingkat Pendidikan di Desa Sibiruang

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Tamatan SD	535
2	Tamatan SMP/ sederajat	499
3	Tamatan SMA/ sederajat	731
4	Tamatan Perguruan Tinggi	239
5	Tidak Bersekolah / tidak tamat SD	302
6	Belum Bersekolah	322
Jumlah		2.628

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 2628 jiwa masyarakat desa Sibiruang, di mana 302 orang tidak/putus sekolah dengan presentase 12%, sebanyak 322 orang belum sekolah, dengan presentase sebanyak 12%, sebanyak 535 orang berpendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan presentase 20%, 499 orang berpendidikan tingkat Menengah Pertama (SMP) dengan presentase sebanyak 19%, 731 orang berpendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan presentase 28% dan sebanyak 239 orang berpendidikan tingkat Perguruan Tinggi dengan presentase 9%. Dari presentase jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di atas, maka dapat dipahami bahwa mayoritas penduduk di Desa Sibiruang berpendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan presentase 28%.

Keagamaan Kehidupan beragama pada dasarnya merupakan kepercayaan terhadap keyakinan adanya kekuatan gaib, luar biasa atau supernatural yang berpengaruh terhadap kehidupan individu dan masyarakat, bahkan terhadap segala gejala alam. Kepercayaan itu menimbulkan perilaku tertentu, seperti berdoa, memuja dan yang lainnya, serta menimbulkan sikap mental tertentu, seperti rasa takut, rasa optimis, pasrah, dan lainnya dari individu dan masyarakat yang mempercayainya¹⁹

Adapun agama yang dianut oleh masyarakat Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar adalah agama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

¹⁹ Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.9
Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Sibiruang

No	AGAMA	JUMLAH
1	Islam	2628
2	Agama Lain	-
Jumlah		2628

Dilihat dari keterangan di atas maka sudah jelas bahwa 100% penduduk Desa Sibiruang adalah memeluk agama Islam yaitu dengan Jumlah, 2628 jiwa atau 100%. Dalam menciptakan masyarakat yang beragama sangat diperlukan dan ditunjang oleh adanya sarana dan prasarana ibadah. Sehingga dengan memadainya sarana dan prasarana ibadah akan dapat memacu minat masyarakat untuk beribadah dan dapat menciptakan suasana beragama ditengah-tengah masyarakat.

Sosial Budaya dan Adat Istiadat Dilihat dari segi sosial dan budaya, masyarakat Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, adalah masyarakat yang mengambil dan mengadopsi sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal, yaitu mengambil garis keturunan dari pihak ibu/perempuan²⁰. Adat istiadat merupakan salah satu dari ciri setiap masyarakat dimanapun ia berada. Diantara satu daerah dengan daerah lain memiliki adat istiadat yang berbeda pula, hal ini dipengaruhi oleh keadaan alam semesta, lingkungan tempat tinggal, dan cara bergaul. Menurut kebanyakan ulama Adat disebut juga dengan 'urf. Secara bahasa adat berarti aturan, perbuatan dan kebiasaan.

²⁰ Albar S. Subari, dkk, *Pokok-Pokok Hukum Adat, Cet. I*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2004), h.19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu adat juga disebut dengan sesuatu yang lazim dituruti atau dilakukan sejak zaman dahulu hingga sekarang.²¹ Sedangkan menurut Abd. Rahman Dahlan, 'urf adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain. Dari pengertian di atas, jelaslah bahwa adat adalah suatu bentuk kebiasaan-kebiasaan yang selalu dilakukan oleh suatu daerah yang senantiasa diikuti oleh masyarakat saat itu dan masyarakat sesudahnya. Selain itu adat istiadat juga dapat dikatakan dengan perundang-undangan atau peraturan tidak tertulis yang mesti diikuti oleh masyarakat pada suatu daerah, sehingga apabila adat istiadat dilanggar akan menimbulkan sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya. Hukum adat desa Sibiruang termasuk juga kedalam hukum adat yang menganut prinsip "Adat Basondi Syara', Syara' Basondi Kitabullah" (adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah).

Di Desa Sibiruang terdapat 6 suku, diantaranya:

1. Suku Piliang
2. Suku Domo
3. Suku Caniago
4. Suku Pitopang

²¹ W. J. S. Poerwardanita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. 4*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Suku niliong
6. Suku Melayu

Dalam suku tersebut, masing-masing dikepalai oleh kepala suku yang mempunyai gelar yang disebut datuok. Seperti suku Piliang yang dipimpin oleh seorang Datuok Paduko Bosagh (Paduka Besar)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Teori Tinjauan Yuridis

1. Pengertian Tinjauan

Tinjauan berasal dari kata “tinjauan” Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)²²

2. Pengertian Yuridis

Kata yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku²³.

Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

Menurut Kamus Hukum Yuridis berarti segala hal yang memiliki sifat hukum, menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan

²² <https://kbbi.web.id/tinjau> di akses 16 agustus 2021

²³ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum²⁴.

B. Teori Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka (1) mengatakan bahwa Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemarso definisi pajak adalah²⁵ :

“Pajak diartikan sebagai perwujudan atas kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan negara dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, baik material maupun spiritual”

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat diambil beberapa ciri atau karakteristik dari pajak, yaitu:

- a. Pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang atau peraturan pelaksanaannya.

²⁴ <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-dimasyarakat.html> di akses 10 Agustus 2021

²⁵ S.R, Soemarso, *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*, Salemba Empat, Jakarta, 2007

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tidak adanya imbalan langsung terhadap pembayaran pajak.
- c. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.
- d. Hasil dari pendapatan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk *public investment*

2. Bentuk bentuk Pajak

a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN.

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan objek PPN, namun ada beberapa pertimbangan, baik soal ekonomi maupun sosial, maka ada beberapa barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN, sehingga tidak termasuk dalam objek PPN. Secara seerhana, objek PPN dikelompokan menjadi dua, yakni²⁶:

1. Barang Kena Pajak (BKP), yaitu barang berwujud berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, serta barang tidak berwujud yang dikenakan PPN.
2. Jasa Kena Pajak (JKP), yaitu tiap-tiap kegiatan berupa pelayanan yang dengan berdasarkan perikatan atau perbuatan

²⁶ <https://www.akulaku.com/artikel/6-jenis-pajak-di-indonesia/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum memungkinkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak, tersedia untuk dipakai. Selain itu, jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, juga termasuk dalam kategori JKP, yang dikenakan pungutan PPN.

Dua kategori di atas ini merupakan garis besar objek PPN yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Secara spesifik, macam-macam objek PPN serta yang tidak termasuk dalam objek PPN tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atau biasa disebut UU PPN dan PPnBM

b. Pajak daerah

Pajak daerah dibagi menjadi 2 jenis yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan oleh kabupaten/kota. Adapun, pengelola pajak tersebut dilaksanakan oleh Dinas atau Badan Pendapatan Daerah. Umumnya, setiap daerah memiliki nama yang berbeda atas dinas atau Badan Pendapatan Daerah tersebut. Berikut jenis-jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah :

- 1) Pajak Propinsi
- 2) Pajak Kendaraan Bermotor
- 3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Pajak Air Permukaan
- 6) Pajak Rokok
- 7) Pajak Kabupaten/Kota
- 8) Pajak Hotel
- 9) Pajak Restoran
- 10) Pajak Hiburan
- 11) Pajak Reklame
- 12) Pajak Penerangan Jalan
- 13) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 14) Pajak Parkir
- 15) Pajak Air Tanah
- 16) Pajak Sarang Burung Walet
- 17) Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan
- 18) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)
- 19) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan

c. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan yang dimaksud adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan, pemanfaatan dan atau penguasaan atas tanah dan atau bangunan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan atau bangunan, di mana pengertian bumi dan atau bangunan dijelaskan sebagai berikut.

“Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia, dan tubuh bumi yang ada di

bawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan“.

Sektor pajak PBB dikategorikan dalam 5 kelompok diantaranya Sektor Pedesaan, Perkotaan, Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan. Namun, ada perubahan pada kategori sektor tersebut, berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) mulai 1 Januari 2014, PBB Perdesaan dan Perkotaan (Sektor P2) telah masuk ke dalam kategori Pajak Daerah. Sedangkan untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan (Sektor P3) masih tetap merupakan Pajak Pusat.

d. Pajak materai

Bea materai adalah pajak atas pemanfaatan dokumen yang dikenakan pada saat sedang mengurus surat-surat tertentu seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

e. Pajak Barang mewah

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM.. Barang-barang yang tergolong mewah memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Bukan merupakan barang kebutuhan pokok.
- 2) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.
- 4) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status.
- 5) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

f. Pajak penghasilan (PPH)

PPH adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

3. Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak²⁷

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat²⁸

Pengertian penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat (1)²⁹

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

b. Unsur-unsur Pajak Penghasilan

- 1) Iuran dari rakyat kepada Negara Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang bukan barang

²⁷ Mardiasmo, Perpajakan Edisi Terbaru, (Yogyakarta:C.V ANDI OFFSET, 2016), h 163.

²⁸ Kementerian Keuangan RI, 2013, *op.cit*

²⁹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Berdasarkan Undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas³⁰

c. Subjek pajak penghasilan

1. Subjek pajak dalam negeri:
 - a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari seratus delapan puluh tiga hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia
 - b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya.
2. Subjek pajak luar negeri:

³⁰ *ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari seratus delapan puluh tiga hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha tetap di Indonesia
- b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari seratus delapan puluh tiga hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia, dan yang dapat menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha tetap di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah:

- 1) Kantor perwakilan negara asing
- 2) Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat :
 - Bukan warga Negara Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta
- Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik

3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :

- a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
- b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota

4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:

- a) Bukan warga negara Indonesia dan
- b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia

d. Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterimanya atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan izin dalam Undang-undang ini

1. Hadiah dan undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
2. Laba usaha
3. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
4. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
5. Bunga termasuk premium, diskon dan imbalan karena jaminan pengembalian uang

e. Wajib pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam pembiayaan negara, dimana Wajib Pajak merupakan bagian dari pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak yang dilakukan selama satu periode tertentu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain tidak akan ada pajak apabila tidak ada Wajib Pajak

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dinyatakan

"Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan"

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang-Undang KUP hanya menetapkan pengertian Wajib Pajaknya secara umum saja tanpa menjelaskan syarat apa saja agar bisa ditetapkan sebagai Wajib Pajak. Untuk dapat menetapkan seseorang atau badan menjadi Wajib Pajak harus melihat pada ketentuan hukum pajak material, yaitu undang-undang pajak yang mengatur masalah hukum pajak material untuk pajak pusat, contohnya Undang Undang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Pembangunan, dan Bea Materai

Dua hal yang melekat pada Wajib Pajak dan dijamin oleh undang undang pajak, yang harus dilaksanakan agar kewajiban kenegaraan dalam bidang perpajakan dapat terlaksana sebagaimana mestinya

Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan secara benar, jika tidak dilaksanakan akan membawa konsekuensi penjatuhan sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak.

f. Kewajiban wajib pajak

Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaannya, yaitu³¹:

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
- 2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- 3) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar

³¹ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010) h.22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Mengisi dengan benar SPT, dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan
- 5) Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan
- 6) Jika diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak / objek yang terutang pajak
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat yang dipandang perlu guna kelancaran pemeriksaan
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

C. Teori Perundang-undangan

1. Pengertian Perundang – undangan

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan

Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan-perundang-undangan sebagai berikut.

- a. Setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.
- c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum dan abstrak yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek/peristiwa/gejala konkret tertentu.
- d. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiele zin*, atau sering juga disebut dengan *algemeen verbindende voorschrift* yang meliputi antara lain: *de supra nationale algemeen verbindende voorschriften, wet, A MvB, de Ministeriele verordening, de gemeentelijke raadsverordeningen, de provinciale stater verordebingen*³²

2. Hierarki Perundang- Undangan

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 hierarki perundangan Undangan Memiliki Urutan dari yang tertinggi adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD 1945 adalah hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. UUD 1945 merupakan peraturan tertinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan nasional
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR

³² Bagir Manan dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundangundangan*, (Yogyakarta: kanisius, 2007),h.11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meliputi Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR yang masih berlaku. Sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara dan MPR 1960 sampai 2002 pada 7 Agustus 2003 Berdasarkan sifatnya, putusan MPR terdiri dari dua macam yaitu Ketetapan dan Keputusan. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang mengikat baik ke dalam atau keluar majelis. Keputusan adalah putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja

3. UU atau Perppu UU adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Perppu adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Mekanisme UU atau Perppu adalah sebagai berikut: Perppu diajukan ke DPR dalam persidangan berikut. DPR dapat menerima atau menolak Perppu tanpa melakukan perubahan. Bila disetujui oleh DPR, Perppu ditetapkan menjadi UU. Bila ditolak oleh DPR, Perppu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Baca juga: Plt Menkumham: Perlu Revisi 23 Undang-Undang untuk Pindah Ibu Kota
4. Peraturan Pemerintah (PP) PP adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. PP berfungsi untuk menjalankan perintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

5. Peraturan Presiden (Perpres) Perpres adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Perda Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdatus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Baca juga: Revisi UU KPK Segera Disahkan Jadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna
7. Perda Kabupaten atau Kota Perda Kabupaten atau Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Walikota. Termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota adalah Qanun yang berlaku di Kabupaten atau Kota di Provinsi Aceh.

3. Regeling dan Beschikking

a. Pengertian regeling

Regeling merupakan tindakan pemerintah dalam hukum publik berupa suatu pengaturan yang bersifat umum, atau abstrak. Pengaturan yang dimaksud dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya. Sehingga melalui regeling tersebut dapat mewujudkan kehendak pemerintah bersama lembaga legislatif, ataupun pemerintah sendiri. Tindakan pemerintah yang dilakukan dalam bentuk mengeluarkan peraturan atau regeling ini dimaksudkan dengan tugas hukum yang diemban pemerintah dengan menerbitkan peraturan-peraturan yang bersifat umum. Yang dimaksud dengan umum adalah pemerintah atau pejabat tata usaha Negara melakukan upaya untuk mengatur semua warga negaranya terkecuali dan bukan bersifat khusus³³.

b. Pengertian Beschikking

Pengertian Beschikking terdapat beberapa definisi Menurut para ahli antara lain :

- 1) WF Prins menyatakan ketetapan sebagai suatu tindakan yang sepihak dalam lapangan pemerintahan yg dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada alat atau organ itu

³³ juniarwibisana.blogspot.com di akses 10 Agustus 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Van der Por menyatakan ketetapan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan, pernyataan kehendak alat-alat pemerintahan itu dlm menyelenggarakan hak istimewa, dengan maksud mengadakan perubahan dalam lapangan perhubungan-perhubungan hukum.
- 3) E. Utrecht dalam bukunya Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, menyatakan Ketetapan adalah suatu perbuatan hukum publik bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat perlengkapan pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa

Dari definisi diatas dapat dijelaskan unsur-unsur ketetapan adalah :

- a) Perbuatan hk sepihak (perbuatan hk publik)
- b) Dilakukan oleh alat-alat pemerintahan
- c) Berdasarkan kewenangan istimewa
- d) Untuk menciptakan/merubah perhubungan perhubungan hukum (menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pemerintah)

A. Peraturan menteri keuangan nomor 6/PMK.03/2021

Peraturan menteri Kuangan Republik Indonesia 6/PMK.03/2021 merupakan peraturan menteri yang membahas mengenai Penghitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai serta pajak penghasilan atas penyerahan / penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token dan voucher

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan ini Mulai berlaku sejak 1 Februari 2021 Peraturan Menteri keuangan nomor 6/PMK.03/2021 Mengatur Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan dimana pajak pertambahan nilai terdapat 16 Pasal dan Pembahasan mengenai Pajak Penghasilan terdapat 4 pasal,

B. Pajak Penghasilan dalam peraturan menteri keuangan Nomor 6/PMK.03/2021

Dalam Peraturan menteri keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 Yang Menjadi subjek Pajak Penghasilan adalah Agen Atau Pengecer Pulsa, kartu perdana, token dan Voucher dimana Pungutan pajak dilakukan Oleh distributor tingkat kedua (server pulsa) kepada agen atau pedagang tingkat terendah yang berhubungan langsung dengan pembeli

Pajak yang dipungut ialah sebesar 0,5%, Pungutan ini dilakukan dengan 2 cara :

- a. Nilai yang ditagih oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua kepada Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya
- b. Menaikan Harga Jual, atas penjualan kepada pelanggan telekomunikasi secara langsung.

Wajib pajak yang di pungut Pajak penghasilan bagi yang tidak Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) besaran tarif pajak lebih tinggi 100% dari tarif yang ditentukan, Besaran ini tidak bersifat final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut. Pajak Penghasilan yang dipungut oleh distributor tingkat kedua ialah berupa deposit yang dilakukan oleh Pengecer atau pedagang

Adapun Pengecer atau Pedagang yang dikenakan pajak sebesar 0,5% adalah pengecer yang Deposit Senilai Atau lebih Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang bukan nilai yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah)

Contoh Pungutan Pajak Penghasilan

PT C merupakan penyelenggara server pulsa dan PT D merupakan Pengecer / pedagang pulsa, Selama bulan Maret 2021, PT D melakukan deposit dengan rincian sebagai berikut³⁴:

- a) tanggal 2 Maret 2021 sebesar Rp8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)
- b) tanggal 17 Maret 2021 sebesar Rp1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- c) tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah)

maka Pajak yang dipungut PT C kepada PT D pada bulan maret adalah :

- a) tanggal 2 Maret 2021, PPh Pasal 22 terutang sebesar 0,5% x Rp8.000.000 = Rp40.000

³⁴ Lampiran Peraturan menteri keuangan nomor 6/PMK.03/2021 yang tidak bisa dipisahkan dengan peraturan Menteri keuangan nomor 6/PMK.03/2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) tanggal 17 Maret 2021 tidak terutang karena pembayaran tidak lebih dari Rp2.000.000
- c) tanggal 23 Maret 2021, PPh Pasal 22 terutang sebesar $0,5\% \times \text{Rp}5.000.000 = \text{Rp}25.000$

Tanggal 31 Maret 2021, PT C memungut Pph dan wajib membuat bukti pemungutan PPh atas penjualan kepada PT D sebesar Rp65.000 untuk Masa Pajak Maret 2021, PT C wajib menyetorkan pemungutan PPh selama Masa Pajak Maret 2021 sebesar Rp65.000 dan melaporkan pemungutan PPh dalam Surat Pemberitahuan PPh Masa Pajak Maret 2021. Jangka waktu penyetoran dan pelaporan PPh tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan.

C. Badan usaha dengan status badan hukum

Perseroan terbatas merupakan suatu badan usaha yang mempunyai kekayaan hak serta kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan nya hak serta kewajiban para pendiri maupun pemilik perseroan hal ini selaras dengan pengertian perseroan terbatas menurut undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang menjelaskan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan memiliki kekayaan sendiri dalam menjalankan perseroan³⁵. perseroan terbatas dalam sistem hukum Indonesia telah diatur Sejak berlakunya kitab undang-undang hukum dagang atau tablet tahun 1847

D. Server Pulsa berbentuk Badan usaha

Demi menjaga keamanan dan kelancaran transaksi agen, tentunya agen memilih Server Pulsa yang telah berbentuk badan usaha Seperti Perseroan Terbatas (PT), dimana Perseroan Terbatas (PT) sudah berbadan hukum. Hal ini dikarenakan bentuk Perseroan Terbatas (PT) disahkan oleh Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Sehingga perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) memiliki tingkat keamanan yang baik secara hukum. Artinya badan usaha berbadan hukum mendapat perlindungan hukum yang jelas. Sebagai contoh adalah ketika Perseroan Terbatas (PT) yang dimiliki sudah berdiri maka nama Perseroan Terbatas (PT) tersebut tidak akan bisa dimiliki perusahaan lain. Sehingga hanya ada satu nama tunggal di dunia usaha Indonesia. Jika ada yang melanggar maka ada sanksi hukum yang akan ditanggung pelakunya³⁶. sehingga perseroan terbatas dalam sistem hukum Indonesia masuk melalui

³⁵ Muhammad Abdul kadir. *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1991) h.6.

³⁶ <https://www.roketpulsa.id/news/keuntungan-mendirikan-badan-usaha-bentuk-pt/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem hukum Belanda berdasarkan asas *konkordansi*³⁷. hal ini salah satunya dapat dilihat dalam pasal 40 kitab undang-undang hukum dagang yang menjelaskan bahwa modal perseroan dibagi atas saham-saham atau sero sero atas nama atau blanko para Persero atau pemegang saham atau sero tidak bertanggung jawab lebih daripada jumlah penuh saham-saham itu perseroan terbatas dapat diartikan sebagai suatu badan hukum badan hukum atau legal person adalah subjek hukum perseroan terbatas sebagai subjek hukum sering juga disebut sebagai *body korporate* yang menurut Philip lipton dan *Body korporate* merupakan istilah umum untuk menyatakan subjek hukum artifisial³⁸

Pasal 1 ayat 1 undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas menjelaskan bahwa perseroan terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas maka

³⁷ Dijan widijowati. *Hukum dagang*. CV Andi Offset. 2012. H.67.

³⁸ Lipton, Philip dan abe Herzberg. *Understanding company law* . pert: the law book company limited.1993

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perseroan terbatas sebagai persekutuan dengan status badan hukum memiliki unsur-unsur sebagai berikut³⁹ :

- 1) Perseroan terbatas harus memenuhi unsur-unsur sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal
- 2) Perseroan terbatas didirikan atas dasar perjanjian
- 3) Perseroan terbatas harus melakukan kegiatan usaha
- 4) Perseroan terbatas memiliki modal yang terbagi atas saham-saham
- 5) Perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku

Perseroan Terbatas memiliki beberapa unsur, unsur-unsur tersebut yakni⁴⁰:

- a. perseroan terbatas merupakan badan hukum
 - b. perseroan terbatas merupakan persekutuan modal
 - c. persoalan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian
 - d. perseroan terbatas bertujuan untuk melakukan kegiatan usaha
- perseroan terbatas memiliki modal yang terdiri dari saham-saham

³⁹ Ahmad yani dan gunawan widjaja, *seri hukum bisnis perseroan terbatas*,(Jakarta : Raja grafindo persada., 2000) h.7.

⁴⁰ Ridwan khairandy, *perseroan terbatas doktrin peraturan perundang undangan dan yuris prudensi*, (Yogyakarta: total media, 2009, h. 4)

Terdapat 15 elemen yuridis terpenting yang membentuk suatu perseroan terbatas berdasarkan pengertian dan hakikat perseroan terbatas yang dapat dilakukan sebagai berikut⁴¹ :

- a. perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian
- b. terdiri dari para pendiri
- c. Pendiri atau pemegang saham perseroan terbatas berada dibawah satu nama bersama
- d. Perseroan terbatas merupakan asosiasi dari pemegang saham atau hanya seorang pemegang saham
- e. Perseroan terbatas termasuk ke dalam badan hukum manusia semu atau badan intelektual
- f. Perseroan terbatas diciptakan oleh hukum
- g. Perseroan terbatas memiliki kegiatan usaha
- h. Perseroan terbatas memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan usaha sendiri
- i. Perseroan terbatas memiliki kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku
- j. Perseroan terbatas memiliki modal dasar modal ditempatkan dan modal yang disetorkan
- k. Memiliki modal yang terbagi dalam saham saham

⁴¹ Munir fuady, *Pengantar Hukum bisnis, menata bisnisdi era global*, (Citra aditya bakti, 2008) h.3.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Perseroan terbatas memiliki kedudukan yang tetap para pendiri dan pemegang saham terus berganti
- m. Perseroan terbatas memiliki kewenangan untuk menerima pengalihan dan pemegang asset asset yang dimiliki
- n. Perseroan terbatas dapat menggugat dan digugat di dalam pengadilan
- o. Perseroan terbatas memiliki organ-organ perusahaan

Perseroan terbatas dapat dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut⁴²:

1. Berdasarkan jumlah dari pemegang saham, perseroan terbatas dapat dibagi menjadi⁴³:
 - a. Perusahaan tertutup dalam arti perseroan terbatas yang belum pernah menawarkan saham saham yang dimiliki kepada public melalui penawaran umum selain jumlah pemegang saham belum sebanyak jumlah pemegang saham dari suatu perusahaan publik
 - b. Perusahaan terbuka dalam arti perseroan terbatas yang telah melakukan penawaran umum atas saham-saham yang dimiliki atau telah memenuhi syarat dan telah memproses dirinya menjadi perusahaan public sehingga telah memiliki pemegang saham publik sehingga perdagangan saham saham dapat dilakukan di Bursa Efek
2. Berdasarkan ikut sertanya pemerintah perseroan, terbatas dapat dibagi menjadi⁴⁴:

⁴² Munir fuady *op.cit* h 105

⁴³ *Ibid* h.15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perusahaan swasta dalam arti perseroan yang saham-sahamnya dimiliki oleh pihak swasta tanpa ada saham yang dimiliki oleh pemerintah
- b. Badan usaha milik Negara dalam kurung BUMN dalam arti perseroan yang saham-sahamnya dimiliki oleh pihak pemerintah Badan Usaha Milik Negara memiliki tujuan bisnis selain memiliki Tujuan sosial sebagai tujuan pemerintah kepada rakyatnya
- c. Badan usaha milik daerah atau BUMD dalam arti perseroan yang saham-sahamnya dimiliki oleh pihak pemerintah daerah badan usaha milik daerah memiliki tujuan bisnis selain memiliki tujuan sosial sebagai tujuan pemerintah daerah kepada rakyat di daerah

Dari Ribuan Server Pulsa di Indonesia yang Berbentuk Badan Hukum hanya beberapa di antaranya PT. Prospek Mitra Abadi Server berasal dari magelang Jawa Tengah yang telah berdiri sejak 2014 dan memiliki agen sampai sekarang sebanyak 37,063 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,

⁴⁴ Ibid h. 16-17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis yang peneliti sampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem Pungutan pajak penghasilan di Indonesia yang menjadi pokok pembahasan adalah peraturan menteri keuangan nomor 6/PMK.03/2021 Tentang Penghitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai serta pajak penghasilan atas penyerahan / penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token dan voucher yang mana sistem perpajakannya pihak ke tiga yaitu server pulsa diberikan kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban pemungutan pajak penghasilan pada kenyataanya server pulsa telah melanggar Pasal 18 ayat 6 poin a dengan memanfaatkan Pasal 18 ayat 2 poin b peraturan menteri keuangan nomor 6/PMK.03/2021
2. Adanya kerugian yang di akibatkan penyelewengan yang dilakukan oleh server pulsa :
 - a. Pedagang pulsa yang bukan merupakan wajib pajak mengalami kenaikan harga modal yang semestinya tidak tertuju padanya, dan mengalami banyak kendala keuangan setelah di terbitkannya peraturan menteri keuangan nomor 6/PMK.03/2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pedagang yang merupakan Wajib pajak yang telah di Pungut pajaknya tidak menerima SPT dari server pulsa, wajib pajak tidak mengetahui besaran pajak yang telah di pungut darinya
- c. Negara mengalami kerugian karena tidak menerima besaran pajak yang semestinya diterima oleh kas negara

B. Saran

1. Adanya pengatruan jelas dan rinci tentang kebijakan mengenai *Withholding tax system* agar pihak ketiga taat dan patuh akan kewajiban untuk memotong pajak penghasilan, agar penerimaan kas Negara optimal dan memadai agar pembangunan Indonesia terus berjalan, dan Pihak Pengecer pulsa / pedagang tidak merasa dirugikan dan di bohongi
2. Pengandengan Pihak ke tiga haruslah memiliki pendidikan yang tinggi serta moral dan wawasan yang luas tentang pajak penghasilan yang di harapkan agar tidak adanya penyelewengan yang dilakukan dan dapat meminimalisir penyelewengan atas kepercayaan yang diberikan

DAFTAR PUSTAKA

- Albar S. Subari, dkk, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Cet. I, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2004
- Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Dokumen Kantor Kecamatan Koto Kampar Hulu
- Fuady, munir, *Pengantar Hukum bisnis, menata bisnis di era global*, Citra aditya bakti, 2008
- Kadir, Muhammad Abdul. *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1991
- Kementerian Keuangan RI, *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Jakarta, 2013
- Khairandy, Ridwan, *perseroan terbatas doktrin peraturan perundang undangan dan yuris prudensi*, total media, Yogyakarta, 2013
- Lampiran Peraturan menteri keuangan nomor 6/PMK.03/2021 yang tidak bisa dipisahkan dengan peraturan Menteri keuangan nomor 6/PMK.03/2021
- Lipton, Philip dan abe Herzberg. *Understanding company law . part: the law book company limited*, 1993
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, Yogyakarta : C.V ANDI OFFSET, 2016
- Noor, Juliansyah, *Metode Penelitian*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016
- Peraturan menteri keuangan nomor 6/PMK.03/2021 Tentang Penghitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai serta pajak penghasilan atas penyerahan / penghasilan sehingga dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token dan voucher
- Profil Kabupaten Kampar
- Rahayu, Siti Kurnia, *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Rimsky K. Judisseno, *Perpajakan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004

Sadi, Muhammad, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007

Saidi, Muhammad Djafar. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007

_____, *Pembaruan Hukum Pajak- Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011

S.R, Soemarso, *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*, Salemba Empat, Jakarta, 2007

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Vites, Thomas G, "*Information reporting and Withholding as Stimuktants of Voluntary Compliance*", dalam *Income Tax Compliance*", edited by Philip Sawicki, Reton VA, American Bar Association,

Widijowati, Dijan, *Hukum dagang*. CV Andi Offset, 2012

W. J. S. Poerwardanita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. 4*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007

Yani Ahmad dan widjaja gunawan, *Seri hukum bisnis perseroan terbatas*. Raja grafindo persada. Jakarta, 2000

<http://m.liputan6.com/bisnis/read/808478/131-juta-pelanggan-listrik-pra-bayar-ri-terbesar-di-dunia>Kominfo.go.id

<https://www.roketpulsa.id/news/keuntungan-mendirikan-badan-usaha-bentuk-pt/>

<https://www.akulaku.com/artikel/6-jenis-pajak-di-indonesia/>

Kemenkeu.go.id/APBN/2020

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Gambar 1. Wawancara dengan bapak Tulus Ikhlas pedagang pulsa di desa Tanjung



Gambar 2. Wawancara dengan bapak Tulus Ikhlas pedagang pulsa di desa Tanjung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3. Selesai wawancara dengan ibu Reni Owner FamilyCell di desa Tanjung



Gambar 4. Wawancara dengan Ibu Yuni owner Em Tree di desa Tanjung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5. Wawancara dengan bapak Hapri owner Tanjung Ponsel di desa Tanjung



Gambar 6. Wawancara dengan bapak Suradi owner Busawa Cellular di desa Tanjung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 7. Wawancara dengan bapak Hidayat owner Fitri Ponsel di desa Sibiruang



Gambar 8. Wawancara dengan Ibu Mira Owner mira Ponsel di desa Sibiruang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *"TINJAUAN YURIDIS PUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN PULSA DAN TOKEN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 6/PMK.03/2021 TENTANG PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA PAJAK PENGHASILAN ATAS PENYERAHAN / PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PENJUALAN PULSA, KARTU PERDANA, TOKEN DAN VOUCHER DI KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU"* yang ditulis oleh :

Nama : **NARDI**
 NIM : 11727100352
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :
 Hari / Tanggal : Jumat, 6 Agustus 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Agustus 2021
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua *
Asril, SH., M.H

Sekretaris
Dr. M. Alfi Syahrin, SH., M.H

Penguji I
Peri Pirmansyah, SH., M.H

Penguji II
Lysa Angraini, SH., M.H

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/40923
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
 Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau**, Nomor :
Un.04/F.II/PP.00.9/3502/2021 Tanggal 21 April 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

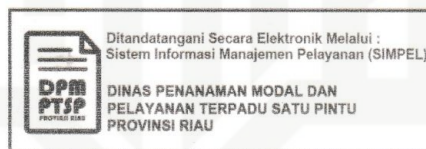
- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | NARDI |
| 2. NIM / KTP | : | 11727100352 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | INJAUAN YURIDIS PUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN PULSA DAN TOKEN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 6/PMK.03/2021 TENTANG PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA PAJAK PENGHASILAN ATAS PENYERAHAN / PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PENJUALAN PULSA, KARTU PERDANA, TOKEN DAN VOUCHER DI KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. DESA SIBERUANG
2. DESA TANJUNG |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 21 April 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic UIN Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2021/406

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/40923 tanggal 21 April 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | NARDI |
| 2. NIM | : | 11727100352 |
| 3. Universitas | : | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 5. Jenjang | : | S1 |
| 6. Alamat | : | PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : | TINJAUAN YURIDIS PUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN PULSA DAN TOKEN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 6/PMK.03/2021 TENTANG PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA PAJAK PENGHASILAN ATAS PENYERAHAN / PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PENJUALAN PULSA, KARTU PERDANA, TOKEN VOUCHER DI KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU |
| 8. Lokasi | : | DESA SIBERUANG, DESA TANJUNG |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 6 Juni 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa,


ONNITA, SE
Penata Tk. I
NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Camat Koto Kampar Hulu di Tanjung
2. Kepala Desa Siburuang Kab. Kampar
3. Kepala Desa Tanjung Kab. Kampar



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU

JL.RAYA TANJUNG NO. 21 DESA TANJUNG
TANJUNG

Kode Pos : 28453

REKOMENDASI

Nomor : 070/UM-KTKH/2021/ 034

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Camat Koto Kampar Hulu, setelah membaca Rekomendasi dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 070/BKBP/2021/406, tanggal 06 Juni 2021, dengan ini memberikan Rekomendasi / Izin riset kepada :

1	Nama	:	NARDI
2	NIM	:	11727100352
3	Fakultas	:	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
4	Jurusan / Program Studi	:	ILMU HUKUM
5	Jenjang	:	S1
6	Alamat	:	PEKANBARU
8	Judul Penelitian	:	TINJAUAN YURIDIS PUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN PULSA DAN TOKEN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 6/PMK.03/2021 TENTANG PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA PAJAK PENGHASILAN ATAS PENYERAHAN / PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PENJUALAN PULSA, KARTU PERDANA, TOKEN VOUCHER DI KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU.
9	Lokasi	:	DESA SIBIRUANG DAN DESA TANJUNG
10	Keterangan	:	Pelaksanaan penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan penelitian dan pengumpulan data yang menyimpang dari ketentuan proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian atau pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini di keluarkan.

Demikian Rekomendasi ini di keluarkan, agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat membantu kelancaran kegiatan penelitian ini, terima kasih.

Di keluarkan di : Tanjung
Pada tanggal : 08 Juni 2021

an. CAMAT KOTO KAMPAR HULU
Sekcam,



Rekomendasi ini di sampaikan kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
2. Kepala Desa Sibiruang di Koto Kampar Hulu
3. Kepala Desa Tanjung di Koto Kampar Hulu

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU
DESA TANJUNG**

JL. PASAR TANJUNG No. 01

Kode Pos 28453

SURAT IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 070/TJ-KTKH/2021/03

Kepala Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, setelah membaca Surat dari Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 070/BKBP/2021/406, Tanggal 06 Juni 2021 dengan ini memberikan Izin Kepada :

Nama	: NARDI
NIM	: 11727100352
Universitas	: UIN SUSKA RIAU
Program Studi	: ILMU HUKUM
Jenjang	: S1
Alamat	: PEKANBARU
Judul Penelitian	: TINJAUAN YURIDIS PUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN PULSA DAN TOKEN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 6/PMK.03/2021 TENTANG PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA PAJAK PENGHASILAN ATAS PENYERAHAN / PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PENJUALAN PULSA, KARTU PERDANA, TOKEN VOUCHER DI KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU
Lokasi Penelitian	: DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU

Untuk melaksanakan kegiatan Riset / Pra Riset dan Pengumpulan Data, untuk Bahan Skripsi.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan penelitian dan pengumpulan data yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian atau pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (Enam) Bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan, agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat membantu kelancaran kegiatan penelitian ini, terima kasih.

Dikeluarkan di : T A N J U N G
Pada Tanggal : 08 JUNI 2021

a.n. KEPALA DESA TANJUNG

Sekdes



RUSLI MUNIR

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU DESA SIBIRUANG

Jalan Olahraga No.345

Kode Pos 28453



SURAT REKOMENDASI

Nomor: 070 /SB-KTKH/2021/622

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET

DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Desa Sibiruang, Setelah Membaca Rekomendasi Dari Kantor Camat Koto Kampar Hulu, Nomor : 070/UM-KTKH/2021/034, Tanggal 09 Juni 2021, Dengan Ini Memberikan Rekomendasi Kepada :

1. Nama : **NARDI**
2. NIM : 11727100352
3. Fakultas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
4. Program Studi : ILMU HUKUM
5. Jenjang : S 1
6. Alamat : PEKANBARU
7. Judul Penelitian : **TINJAUAN YURIDIS PUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN PULSA DAN TOKEN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 6/PMK.03/2021 TENTANG PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA PAJAK PENGHASILAN ATAS PENYERAHAN / PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PENJUALAN PULSA, KARTU PERDANA, TOKEN VOUCHER KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU**

8. Lokasi Penelitian : DESA SIBIRUANG DAN DESA TANJUNG

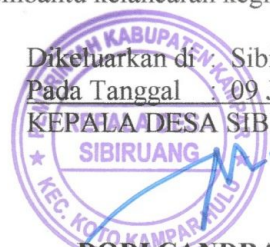
9. Keterangan : Pelaksanaan penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan penelitian dan pengumpulan data yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian atau pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan, agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat membantu kelancaran kegiatan penelitian ini, terima kasih.

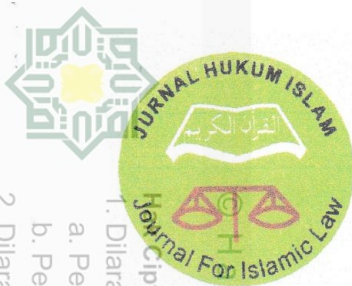
Dikeluarkan di : Sibiruang
Pada Tanggal : 09 Juni 2021
KEPALA DESA SIBIRUANG



DODI CANDRA, SE

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : NARDI
NIM : 11720714789
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : TINJAUAN YURIDIS PUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN PULSA DAN TOKEN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 6/PMK.03/2021 TENTANG PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA PAJAK PENGHASILAN ATAS PENYERAHAN / PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PENJUALAN PULSA, KARTU PERDANA, TOKEN DAN VOUCHER DI KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU

Pembimbing: H. Mhd Kastulani SH, MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 16 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.

NIP. 19880430 201903 1 010

RIWAYAT PENULIS



Nardi, dilahirkan di Bandur Picak pada tanggal 11 oktober 1998, anak ke 7 dari 7 orang bersaudara, yang merupakan Putra dari Pasangan Anas (Alm) dan Rahma, saat ini penulis tinggal di jalan manunggal Perumahan Darco Lestari

Penulis menempuh pendidikan mulai dari SD Negeri 023 Bandur Picak lulus pada 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) PP. Miftahul Mu'arrif Bandur Picak dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2014, dan setelah itu Penulis Melanjutkan Pendidikan di Madrasah Aliyah PP. Miftahul Mu'arrif Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dan lulus pada tahun 2017

Pada Mei 2017 Penulis diterima di perguruan tinggi yang di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) pada jalur SNMPTN dengan jurusan Ilmu hukum Fakultas syariah dan hukum

Pada 2019 penulis melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di kantor notaris Rendra Hakim, Rimbo Panjang setelah itu melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) di desa Bandur Picak, dan pada 6 Agustus 2021 Penuli dinyatakan Lulus dengan Judul Skripsi Tinjauan Yuridis Pungutan Pajak Penghasilan Atas Penjualan Pulsa dan Token Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 Tentang Penghitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai serta pajak penghasilan atas penyerahan / penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token dan voucher di Kecamatan Koto Kampar Hulu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.